



# LAPORAN TAHUNAN 2012

## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**



**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

*LAPORAN TAHUNAN*

**2012**

**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**

**SAMBUTAN**  
**KETUA KOMITE KONSULTATIF**  
**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2012 ini merupakan tahun ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis AkruaI (Lampiran I) maupun SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI (Lampiran II), hal ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk persiapan secara bertahap penerapan SAP Berbasis AkruaI yang paling lambat diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015. Untuk menghadapi penerapan akuntansi berbasis akruaI tersebut, di tahun 2012 KSAP telah menyiapkan beberapa draf PSAP yang berbasis akruaI.

Pada tahun 2012, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan implementasi SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI (*cash towards accrual*), seperti penyusunan beberapa Buletin Teknis beserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2012 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2012 ini, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2012 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2013

Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Agus Suprijanto

**PENGANTAR  
KETUA KOMITE KERJA  
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Laporan Tahunan KSAP Tahun 2012 ini disusun sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2012.

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), KSAP terus berupaya mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selama tahun 2012 selain menyusun Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan beberapa Buletin Teknis, KSAP juga melaksanakan tugas untuk ikut mendorong implementasi SAP dengan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, lokakarya (*workshop*), pelayanan publik, dan *help desk*. Selain itu KSAP juga memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diterima KSAP terkait permasalahan dalam implementasi SAP baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

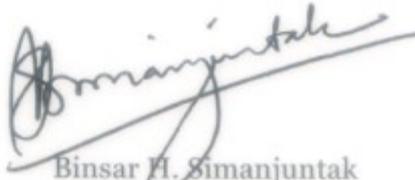
Tahun 2012 ini, KSAP juga telah mengikuti sejumlah agenda internasional antara lain kunjungan ke Thailand untuk menghadiri *9th Annual Meeting of OECD-Asian Senior Budget Officials*, diselenggarakan di Bangkok - Thailand tanggal 13-14 Desember 2012

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, selain melaporkan seluruh kegiatan KSAP sepanjang Tahun 2012, Laporan Tahunan KSAP Tahun 2012 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP tahun 2012.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Januari 2013  
Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif .....	1
Pengantar Ketua Komite Kerja.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
Bab I Pendahuluan.....	5
A.Organisasi dan Kedudukan KSAP .....	5
B.Tugas Pokok KSAP .....	7
Bab II Rencana Kerja KSAP .....	9
A.Kondisi Umum .....	9
B.Rencana Strategis.....	10
Bab III Kinerja KSAP .....	16
A.Capaian Kinerja.....	16
B.Pelaksanaan Kegiatan .....	17
C.Aspek Keuangan.....	22
D.Kendala dan Strategi Pemecahannya .....	23
Bab IV Rencana Kerja Tahun 2013 .....	24
Bab V Penutup.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : *Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014* ..... 11

Tabel 2 : **Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2012** ..... 23

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 3 tahun 2009.



*Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan komite independen yang bertugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*

### ***A. Organisasi dan Kedudukan KSAP***

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah:

### ***Komite Konsultatif:***

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

### ***Komite Kerja:***

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Trihartarta, Ak., MM sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak.,MM sebagai Anggota;\*
5. Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,CGFM sebagai Anggota;\*
6. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
7. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA sebagai Anggota; dan\*
9. Dr. Dwi Martani, SE, Ak. sebagai Anggota;

(\*) Anggota dimaksud sudah tidak aktif sebagai anggota Komja

- Drs. Sugijanto, Ak.,MM : Mengundurkan diri karena kesibukan lain
- Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,CGFM : Bertugas di World Bank
- Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA : Bertugas di BPK



*Anggota Komite Kerja KSAP :  
(ki-ka) Jan Hoesada, Dwi Martani, AB. Trihartarta, Binsar H. Simanjuntak,  
Sonny Loho, Yuniar Yanuar Rasyid.,*

## **B. Tugas Pokok KSAP**

Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2009, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Keppres No. 3 Tahun 2009, KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2009, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2012 terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 23 November 2012 dengan KEP-10/K.1/KSAP/IX/2012 beranggotakan 29 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Ketua;
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua;
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
4. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
5. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., Anggota;
6. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
7. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
8. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
9. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
10. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
11. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
12. R. Wiwin Istanti, SE, Ak., M.LAWS., Anggota;
13. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak., M.Si., Anggota;
14. Heru Novandi, SE, Ak., Anggota;
15. Muliani Sulya F., SE, Anggota.
16. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
17. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP, Anggota;
18. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota;
19. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc, Anggota.
20. Hari Sugiyanto, Ak. MSc., Anggota;
21. Basuki Rahmat, SE, Anggota;
22. Iskandar Novianto, Ak., M.Si., Anggota;
23. Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, Anggota;

24. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, Anggota;
25. Ayu Novita Wulandari, SE, Ak., Anggota;
26. Drs. Hamdani, MM., MSi., Ak., Anggota;
27. Ahmad Muam, Ak., MM., Anggota.
28. Farhan Fatnanto, SE, Ak., Anggota; dan
29. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota;

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 11/KM.5/2012 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Hari Sugiyanto, Ak. MSc, Ketua;
2. Masta Boru Manurung, Wakil Ketua;
3. Budiman, Anggota;
4. Zulfikar Aragani, Anggota
5. Siti Syarifah, Anggota;
6. Basuki Rahmat, Anggota;
7. Husni Firmansyah, Anggota;
8. Ahmad Abdul Haq, Anggota;
9. Wachid Ahyani, Anggota; dan
10. Affifah Nurviana, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



*Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP*

## BAB II

# RENCANA KERJA KSAP

## TAHUN 2012

### A. *Kondisi Umum*

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Penyusunan Rencana Strategis KSAP tahun 2012 – 2015 disesuaikan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2012 dan 2013, Fokus utama dari KSAP adalah penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk melengkapi PSAP yang telah ada, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana tertuang pada PP SAP. Sedangkan Buletin Teknis berisi informasi dan penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

Tugas berikutnya dari KSAP pada periode 2013 – 2015 adalah membantu implementasi SAP baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. KSAP akan mendorong Pemerintah agar mempersiapkan implementasi akuntansi akrual dengan baik, sehingga pada tahun 2015 diharapkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sudah menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

## ***B. Rencana Strategis***

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

### ***Visi :***

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."*

### ***Misi :***

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

**Tujuan:**

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rencana kerja tersebut telah disesuaikan berdasarkan perkembangan yang terjadi selama tahun 2012.

**Tabel 1: Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014**

<b>A. Tahun 2010</b>		
1.	Penyusunan SAP Berbasis Akrua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi SAP Berbasis Akrua</li> <li>2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP</li> <li>3. Penerbitan PP SAP Berbasis Akrua</li> </ol>
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP CTA               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> </ul> </li> <li>2. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP Akrua               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis PNB</li> </ul> </li> <li>3. Penerbitan buletin teknis SAP CTA               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> </ul> </li> </ol>
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>

4.	International Events	Pertemuan <i>Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries</i>
<b>B. Tahun 2011</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO
2.	Penyusunan <i>Buletin Teknis SAP</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> <li>• Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman</li> </ul> </li> </ol>
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>
<b>C. Tahun 2012</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO</li> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum</li> </ul>
2.	<i>Penyusunan Interpretasi PSAP</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Interpretasi PSAP tentang tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah</li> <li>• Penyusunan IPSAP tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah</li> </ul>
3.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> </ul>
4.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>

<b>D. Tahun 2013</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruwal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO</li> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi BLU</li> <li>• Pengembangan SAP Berbasis Akruwal sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akruwal sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruwal dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>
<b>E. Tahun 2014</b>		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruwal	Pengembangan SAP Berbasis Akruwal sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akruwal sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruwal dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2012 adalah sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal**

Pada tahun 2012 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akruwal (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya PSAP.

### **2. Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)**

KSAP di Tahun 2012 ini merencanakan menyusun beberapa IPSAP dalam rangka mendukung implementasi SAP. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan yang diterima oleh KSAP. IPSAP ini disusun untuk memberikan penjelasan, klarifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya IPSAP.

### **3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**

KSAP di Tahun 2012 ini merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Buletin teknis ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

### **4. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Walaupun Tahun 2012 merupakan tahun ketiga sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, namun masih dipandang penting untuk melakukan sosialisasi SAP tersebut. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi SAP.

### **5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan**

#### **a. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

#### **b. Workshop Buletin Teknis SAP**

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, pada tahun 2012, KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai buletin teknis yang telah diterbitkan. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2012.

#### **b. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

#### **c. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

**d. Penyelenggaraan *Help Desk***

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

## BAB III

# KINERJA KSAP



*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Kas Menuju Akrual)*

### A. Capaian Kinerja

Tahun 2010 merupakan masa yang penting bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, karena pada tahun 2010 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai SAP Berbasis Akrual telah diterbitkan, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Tahun 2012 merupakan periode untuk mensosialisasikan sekaligus sebagai kelanjutan sosialisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2011. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya untuk mensosialisasikan SAP namun juga mensosialisasikan produk-produk KSAP lainnya.

Selain sosialisasi SAP Berbasis Akrual, pada Tahun 2012 KSAP juga menerbitkan IPSAP, Buletin Teknis, menyusun draft SAP, melakukan layanan publik berupa konsultasi permasalahan implementasi SAP serta sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan kegiatan lainnya.

Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2012 adalah:

1. Penetapan IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

2. Penetapan Buletin Teknis SAP No. 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
3. Penyusunan 2 (dua) draf Pernyataan Standar, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan-LO dan PSAP tentang Akuntansi BLU;
4. Penyusunan 4 (empat) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Akuntansi Hibah, Buletin Teknis tentang Akuntansi Kas, Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak;
5. Sosialisasi Bultek No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Bultek No. 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing, IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah pada tanggal 13 Desember 2012;
6. Sosialisasi SAP pada beberapa Kementerian/Lembaga, Pemda dan Perguruan Tinggi antara lain oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Universitas Lambung Mangkurat.
7. Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri; dan
8. Pelayanan Publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain tentang Pencatatan/Koreksi Kas dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Akuntansi atas Antisipasi resiko Usaha bagi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyusutan Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dst.

## ***B. Pelaksanaan Kegiatan***

### ***1. Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan***

Dalam tahun 2012, KSAP telah menetapkan 2 (dua) buah IPSAP yaitu IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP telah menerbitkan 3 (tiga) Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP), yaitu:

1. IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing;

2. IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah; dan
3. IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

## ***2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan***

Dalam tahun 2012, KSAP telah menetapkan 1 (satu) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang asing. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP telah menerbitkan 12 (dua belas) buletin teknis yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
11. Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
12. Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing;



*Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing*

Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan, sampai akhir tahun 2012 sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Hibah;
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kas;
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
4. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak;

### **3. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam tahun 2012, KSAP telah mengembangkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan hingga akhir tahun 2012 telah tersusun beberapa draf PSAP sebagai berikut:

1. PSAP tentang Pendapatan - LO; dan
2. PSAP tentang Akuntansi dan Pelaporan BLU.

### **4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan**

#### **Kegiatan 1: *Limited Hearing***

Tahun 2012, KSAP menyelenggarakan 2 kegiatan *limited hearing* yaitu *Limited Hearing* Draft IPSAP tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Draft IPSAP tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan *Limited Hearing* Bultek Akuntansi Hibah.

*Limited hearing* pertama tentang Draft IPSAP tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Draft IPSAP tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk menyampaikan pokok-pokok substansi IPSAP serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait. Acara ini diadakan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012 dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, beberapa Kementerian/Lembaga, Akademisi dari beberapa perguruan tinggi, BPKP dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

*Limited hearing* Bultek Akuntansi Hibah diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2012 di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok substansi draft Bultek Akuntansi Hibah serta menggali masukan dari pihak-pihak kompeten terbatas yang terdiri dari BPK, BPKP, Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintahan Daerah dan Akademisi.

**Kegiatan 2: Sosialisasi IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Sosialisasi Bultek No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Serta Bultek No. 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Pada tahun 2012 ini, KSAP telah menyelenggarakan Sosialisasi IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Sosialisasi Bultek No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, serta Bultek No. 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Sosialisasi tersebut diadakan di Jakarta tanggal 13 Desember 2012.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atas produk-produk terbaru KSAP sebagai turunan dari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang telah tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga mensosialisasikan Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.



*Sosialisasi SAP Tahun 2012 :*

*IPSAP 02 & 03  
Bultek 11 & 12*

Sosialisasi ini dihadiri oleh kalangan akademisi, Perwakilan BPK, Perwakilan BPKP, para praktisi baik dari lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun inspektorat di pemerintah daerah, serta dari kementerian negara / lembaga yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah serta pihak lain yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

**Kegiatan 3: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP**

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain:

- *9th Annual Meeting of OECD-Asian Senior Budget Officials, diselenggarakan di Bangkok Thailand tanggal 13-14 Desember 2012, dan*
- *Konvensi Nasional Akuntansi VII di Yogyakarta.*

#### **Kegiatan 4: Pemeliharaan Website KSAP**

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*. Pada Tahun 2012 telah dilakukan perbaikan tampilan Website KSAP tersebut.

Pada *website* tersebut juga tersedia email para anggota KSAP.



Tampilan muka Website KSAP : [www.ksap.org](http://www.ksap.org) sebagai media sosialisasi KSAP yang menjembatani KSAP dengan Stakeholder KSAP

#### **Kegiatan 5: Penyelenggaraan Help Desk**

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

#### **Kegiatan 6: Pelayanan Publik**

Pada tahun 2012, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Pencatatan/Koreksi Kas dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Penganggaran Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Yang Tidak Direalisasikan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Akuntansi dan pelaporan atas Kas, Piutang dan Aset Lainnya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
4. Pencatatan Aset Tetap pada Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akuntansi atas Antisipasi resiko Usaha bagi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Perlakuan Akuntansi terhadap kas di Neraca dan SILPA di LRA dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
7. Penyusutan Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kas Di Bendahara Pengeluaran dari Provinsi Kabupaten Lumajang;
9. Penyajian Dana BOS dari Kota Tangerang;
10. Pedoman Akuntansi atas Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutannya dari Pemerintah Kota Surakarta;
11. Perlakuan Akuntansi atas Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Penyajian Piutang dan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dari Provinsi Kalimantan Timur;
13. Perlakuan Akuntansi atas Fasilitas Perseorangan dan Fasilitas Umum pada Kemnakertrans dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Perlakuan Akuntansi Dana Bergulir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
15. Metode Pengakuan, Pencatatan dan Penyajian atas Sisa Aset eks BPPN dari DJKN Kementerian Keuangan;
16. Pembukuan Dana BOS dari Provinsi Kalimantan Timur; dan
17. Perlakuan Akuntansi atas beberapa Organisasi International Berbentuk Fund.

### ***C. Aspek Keuangan***

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2012, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp3.015.613.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan Nomor 0160/015-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp3.015.105.370 atau 99,98% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2012:

**Tabel II : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2012**

<b>Kode Jenis Belanja</b>	<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp3.015.613.000	Rp2.957.125.370	98,06%
53	Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp3.015.613.000</b>	<b>Rp2.957.125.370</b>	<b>98,06%</b>

#### ***D. Kendala dan Strategi Pemecahannya***

Pada tahun 2012, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan namun sampai dengan akhir tahun 2012 target tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan KSAP memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi buletin teknis yang cukup kompleks. Selain itu, selama tahun 2012, KSAP juga banyak menerima pertanyaan/konsultasi terkait permasalahan implementasi SAP dari berbagai unit instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan KSAP harus membahasnya secara hati-hati sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di tahun-tahun berikutnya, KSAP telah membentuk tim-tim kecil yang bertugas mengkaji dan menjawab atas pertanyaan/konsultasi dari berbagai instansi pemerintah tersebut.

## BAB IV

# RENCANA KERJA TAHUN 2013

Untuk mendukung implementasi SAP dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2013 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan PSAP

Pada tahun 2013, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual, yaitu Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO) dan menyusun PSAP Akuntansi BLU serta revisi PSAP Investasi. PSAP ini akan melengkapi PSAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

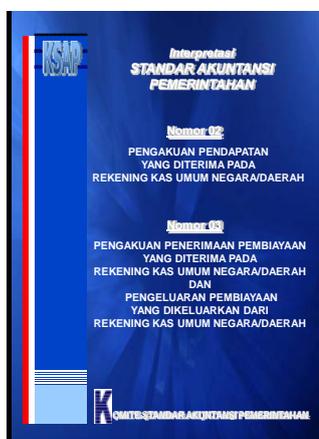
### 2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2013, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP baik SAP Berbasis Kas Menuju Akrual maupun SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang akan diterbitkan adalah:

- 1) Buletin Teknis Hibah; dan
- 2) Buletin Teknis Kas

Pada tahun 2013, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.



IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan

IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

### 3. Sosialisasi, *Workshop*, dan *Training of Trainers* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

Pada tahun 2013, KSAP akan mengadakan sosialisasi dan *workshop* mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2013, KSAP juga merencanakan mengadakan *Training of Trainers* mengenai SAP Berbasis Akrual.

### 4. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

### 5. Pemeliharaan *Website* KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs [www.ksap.org](http://www.ksap.org).

### 6. Pemeliharaan *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2013. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

### 7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## BAB V

# PENUTUP

Laporan Tahunan 2012 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



*KSAP menghadiri 9th Annual Meeting of OECD-Asian Senior Budget Officials, diselenggarakan di Bangkok Thailand tanggal 13-14 Desember 2012*



Sekretariat KSAP :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat, 10710  
Telp.Fax: 021-3524551  
[www.ksap.org](http://www.ksap.org)